

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul.

Dunia memang banyak memuat berbagai fenomena yang menarik, sebagai contoh kasus adalah proses tumbuh dan berkembangnya kultur dan budaya Jawa di Suriname. Padahal kita bersama ketahui bahwa antara Pulau Jawa di Indonesia dengan Suriname sudah berbeda Benua yang dipisahkan oleh Samudera yang berjarak ribuan mil, namun keberadaan budaya Jawa di Suriname memang benar adanya bahkan eksistensinya mampu mengalahkan kebudayaan di Pulau Jawa Indonesia sendiri.

Berawal dari kaum imigran dari Pulau Jawa yang dikirim ke Suriname oleh penjajah Belanda pada masa kolonialisme, sekarang komunitas Jawa tersebut telah beranak-pinak serta tumbuh dan berkembang. Bahkan beberapa diantaranya mampu menduduki posisi elit dan birokrat pada Pemerintahan di Suriname.

Pada masa sekarang, setelah terpilihnya Presiden Julesh Alberth Bosh. Eksistensi budaya Jawa di Suriname semakin teruji sebagai aset nasional, di dalam mekanisme dukungan rezim tersebut terdapat berbagai dinamika dan fenomena-fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari dinamika kenegaraan yang termasuk dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

Dipilih tema tentang dukungan Presiden Julesh Alberth Bosh dalam mempertahankan eksistensi budaya Jawa di Suriname karena penulis menganggap bahwa tema ini belum pernah ditulis sebelumnya oleh civitas akademika Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat terbentuk karya skripsi yang menarik dan diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **B. Latar Belakang Masalah.**

Presiden Jules Alberth Bosh merupakan Presiden ketujuh dari Presiden di Suriname. Sekarang pada tahun 2001 hingga tahun 2005, Suriname dipimpin oleh

Presiden Ronaldo Ronald Venetiaan. Namun sepanjang sejarah kepemimpinan di Suriname, rezim Presiden Jules Alberth Bosh merupakan rezim yang paling menarik karena mampu mengadakan pembaharuan di berbagai sektor.<sup>1</sup>

Presiden Venetiaan terpilih untuk periode yang kedua, dengan kata lain sebelum kepemimpinan Jules Alberth Venetiaan juga telah memimpin Suriname pada rentang tahun 1992-1996 setelah menggantikan kepemimpinan Ramsenwak Shankar. Namun kepemimpinan Venetiaan kurang mendapat legitimasi publik Suriname, pasca kepemimpinan rezim Venetiaan Jules Alberth memimpin Suriname dengan membawa perubahan yang fundamental.<sup>2</sup>

Jules Alberth Wijdenbosh mengakhiri kepemimpinannya pada tahun 2000, selanjutnya kembali digantikan oleh Venetiaan yang berhasil membawa kemajuan Suriname. Namun haluan dan program kerja Venetiaan lebih bersifat meneruskan kebijakan-kebijakan Jules Alberth, sehingga Jules Alberth

---

<sup>1</sup> *Media Indonesia (Rubrik Internasional)*, 31 Desember 2004. Hal 12

<sup>2</sup> *Ibid.*

mampu berperan sebagai tokoh pembaharuan di Suriname.

Suriname merupakan negara bekas jajahan Belanda dan Inggris, sehingga nilai-nilai Eropa di negara ini terlihat relatif kental. Suriname merdeka pada 25 November 1975, dalam sepanjang sejarah pemerintahan di Suriname pernah mengalami gejolak politik yaitu kudeta pemerintahan yang dilakukan oleh pihak militer.<sup>3</sup>

Kudeta militer tersebut terjadi pada 25 Februari 1980, dalam kudeta tersebut pemerintahan demokrasi parlementer jatuh kemudian pemerintahan dijalankan oleh pihak militer. Dalam pemerintahan militer tersebut, terjadi berbagai gejolak di berbagai penjuru Suriname. Gejolak tersebut dilatar belakangi oleh gerakan-gerakan sporadis yang dijalankan oleh kelompok militan.<sup>4</sup>

Kelompok militan tersebut antara lain komunitas negro atau 'Bushnegro yang dipimpin oleh Mandela dan kelompok Tukayana Amazon, komunitas ini antara lain

---

<sup>3</sup> Irsan. Abdul, *Hubungan Indonesia-Belanda Antara Benci dan Rindu*, Penerbit Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2003. Hal 31

<sup>4</sup> *Media Indonesia (Rubrik Internasional)*, 6 Desember 2004. Hal 12

dianggotai oleh beberapa masyarakat Jawa, Kreol dan India. Tukayana Amazon dipimpin oleh Rony Bruswijk, gejolak akibat kudeta tersebut menimbulkan respon dari dunia internasional hingga Pemerintah Belanda menghentikan bantuan dan proteksi terhadap Suriname.

Berbagai gejolak tersebut akhirnya mampu diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga pada bulan November 1987 pihak militer mengembalikan kekuasaan pemerintahan Suriname kepada pihak sipil. Supremasi sipil kembali dengan adanya beberapa pemilihan umum.

Proses pemilihan umum tersebut diikuti beberapa partai, partai tersebut antara lain Partai Kreol Nasional, Partai Hindustan Persatuan Reformasi, Partai Jawa Pertjaya Luhur dan beberapa partai besar yaitu NDP (*National Democratic Party*) dan Partai Aliansi Rakyat.

Presiden Julesh Alberth merupakan presiden ketujuh, presiden sebelumnya adalah Johan Ferrer, Hanck Cristhison, Ramdat Misier, Johan Kraag, Ramsenwak Shankar, Ronald Venetiaan dan Jules Alberth Wijdenbosh. Dalam kepemimpinan Jules Alberth

berbagai prestasi gemilang mulai nampak, antara lain kebijakan kerjasama luar negeri dan pembaharuan sistem perekonomian.<sup>5</sup>

Berbagai terobosan yang dijalankan oleh rezim Julesh Alberth di Suriname antara lain peningkatan hubungan luar negeri, baik yang bersifat bilateral, multilateral ataupun melalui perusahaan transnasional ataupun program kebijakan investasi asing (*Direct Investment*) yang marak di beberapa kota besar di Suriname.

Disamping peningkatan kerjasama dengan beberapa negara asing, Suriname juga semakin mengintensifkan posisinya pada organisasi internasional. Beberapa organisasi tersebut antara lain FAO, IBRD, kelompok negara G-77 dan menjadi anggota beberapa sub organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerjasama tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan ekspor Suriname ke beberapa negara dunia, khususnya pada beberapa komoditas unggulan antara lain batubara, bauksit dan bijih besi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Gatra, Edisi 14 Desember 2004. [www.gatra.com](http://www.gatra.com) diakses pada 9 Agustus 2005

<sup>6</sup>Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, 9 Agustus 2002.

Dalam kepemimpinan Julesh Alberth juga berhasil membawa kemajuan tingkat perekonomian Suriname, walaupun nilainya masih belum dapat dikatakan sebagai peningkatan yang krusial. Peningkatan tersebut senilai 987.50 Guilder (SRG) terhadap US Dollar pada tahun 1999, 410.00 Guilder (SRG) tahun 1998 dan pada tahun 2000 terjadi peningkatan yang relatif drastis yaitu senilai 2.178.50 Guilder.<sup>7</sup>

Kedatangan komunitas etnis Jawa di Suriname dari Pulau Jawa di Indonesia, didominasi oleh beberapa kantong masyarakat Jawa yang digunakan oleh pihak kolonialis Belanda untuk kerja rodi (*Kerja Paksa*). Kehadiran komunitas Jawa di Suriname dimaksudkan oleh pihak kolonialis Belanda (*VOC/Vorinijne Indische Company*), untuk dipekerjakan di industri-industri pertambangan di Suriname.

Komunitas Jawa di Suriname untuk pertama kali didatangkan dari Jawa pada tahun 1890 yang berjumlah sekitar 94 orang. Sebelum kedatangan komunitas etnis Jawa di Suriname, didahului oleh kedatangan etnis Hindustan dari India pada sekitar tahun 1873. pada

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

tahun-tahun selanjutnya kedatangan etnis Jawa semakin mengalami peningkatan dan hingga pada tahun 1939, jumlah penduduk Jawa di Suriname mencapai 32.956 jiwa atau meningkat sekitar 34 kali.<sup>8</sup>

Kehidupan komunitas etnis Jawa di Suriname juga terdapat beberapa kelompok yang tidak mampu beradaptasi dan memilih untuk kembali ke Indonesia. Sejak kedatangan pada tahun 1890 hingga 1939, tercatat sejumlah 8120 orang Jawa yang kembali ke Indonesia. Dalam kehidupannya di Suriname, masyarakat Jawa perantauan ini mampu beradaptasi dengan penduduk pendatang lainnya serta penduduk asli Suriname yaitu komunitas Kreole.<sup>9</sup>

Masyarakat Jawa secara turun-temurun, juga berhasil mempertahankan eksistensinya. Dalam beberapa kasus perkawinan, penduduk Jawa bukan hanya menjalankan dengan sesama komunitas etnis Jawa namun juga dengan etnis Kreole dan India walaupun nilainya kurang mendominasi. Sehingga hal ini akan memperkuat

---

<sup>8</sup> *Kompas*, 19 Agustus 2002.

<sup>9</sup> Komunitas Kreole merupakan masyarakat asli yang tinggal di Suriname, beberapa data mengatakan bahwa komunitas etnis ini merupakan keturunan Amerika Latin Tengah yang identik dengan komunitas asli Guyana dan Brazilia, khususnya penduduk kawasan Macapa dan Manaus.

sistem asimilasi etnis Jawa dengan etnis-etnis lainnya di Suriname.

Secara umum perkembangan komunitas dan budaya Jawa di Suriname memang relatif stabil. Hal ini dikarenakan Suriname adalah negara asimiliasi hal ini diperkuat dengan pendapat tokoh sosialis internasional Charles Coppel, bahwa di negara yang dibentuk oleh pendatang akan tercipta suatu persamaan nasib dalam menjalani hidup di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Dalam era kepemimpinan sebelum Presiden Julesh Wijdenbosh, perkembangan komunitas budaya Jawa juga relatif stabil bersama-sama dengan komunitas etnis lainnya (*Kreole, Negro dan India*). Hal yang mendasar bagi Presiden Julesh Alberth Bosh dengan Presiden sebelumnya terhadap eksistensi budaya Jawa di Suriname adalah peran keluar dalam menjalankan sistem hubungan luar negeri non-pemerintah (*Relations Non State/Government*), kapasitas Bosh adalah sebagai fasilitator dan motivator sehingga

---

<sup>10</sup> Coppel, dalam Leo Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1990. Hal 29.

akan menimbulkan suatu sistem "Multiple Effect" yang memberikan benefit bagi Suriname secara umum dan komunitas Jawa di negara ini.

Dengan kata lain, perbedaan eksistensi budaya Jawa di Suriname sebelum dan sesudah kepemimpinan Julesh Alberth Bosh adalah mekanisme penyelenggaraan politik "Over Seas", yaitu pemberdayaan komunitas Jawa sebagai ujung tombak dalam mengadakan kerjasama dengan Indonesia sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan politik internasional. Demikian juga halnya dengan etnis India dan etnis Negro yang diupayakan untuk merintis hubungan dengan negara India dan Afrika Selatan.

Salah satu hal yang perlu di garis bawahi, mengapa Julesh Alberth Bosh lebih "sukses" dalam mendukung eksistensi komunitas Jawa jika dibanding etnis sebelumnya adalah tindakan Alberth Bosh menjalankan kebijakan poros etnis pendatang di Surinae dengan negara asalnya. Momentum ini sebelum kepemimpinan Alberth Bosh, hampir tidak dapat dilaksanakan karena ada kecenderungan bahwa rezim-

rezim sebelumnya lebih berkonsentrasi pada masalah-masalah dan problematika dalam negeri.

Dengan kebijakan mengembangkan budaya dan komunitas Jawa di Suriname, maka juga akan memberikan benefit yang potensial yaitu investasi yang terus berkembang karena politik luar negeri yang prima yang salah satunya dipengaruhi oleh perealisasi gagasan poros negara asal (*Indonesia, India dan Afrika*). Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebijakan politik luar negeri yang Suriname yang prima dibawah kepemimpinan Bosh, akan berdampak positif pada kondisi sosial, politik dan perekonomian Suriname, terutama jika dibandingkan rezim-rezim Suriname sebelum kepemimpinan Alberth Bosh.

Kemajuan tersebut dicapai karena Julesh Alberth mampu mempertahankan situasi kondusif dalam scope dalam negeri serta merealisasikan stabilitas pemerintahan Suriname. Kestabilan tersebut karena Julesh Alberth mampu menyeimbangkan antara kekuatan-kekuatan dalam negeri Suriname.

Unsur-unsur kekuatan tersebut antara lain unsur kependudukan yang terdiri dari beberapa etnik, oleh Julesh Alberth unsur-unsur tersebut diakomodir sehingga "tidak ada" pihak atau komunitas yang dilemahkan. Termasuk didalamnya komunitas Jawa yang keberadaannya telah menjadi aset integral Suriname.

Dalam dukungannya terhadap komunitas Jawa, Presiden Julesh Alberth secara penuh dapat dilihat melalui dukungan terhadap pembentukan Organisasi Persatuan Imigran Jawa (VHJI). Disamping itu rezim Julesh Alberth juga mendukung perkembangan kebudayaan Jawa yang telah menjadi aset integral Suriname, dukungan terhadap budaya Jawa tersebut antara lain melalui Manajemen TV berbahasa Jawa yaitu TV Garuda, TV Mustika, Radio Pertjaya, Tradisi Ruwahan, Suran, Sekaten dan beberapa kultur atau kebudayaan Jawa lainnya.

Keberadaan komunitas Jawa dalam Pemerintahan di Suriname pada kepemimpinan rezim Julesh Alberth, sudah mampu berjalan sebagai mitra. Bahkan Partai Pendawa Lima dan Kerukunan Tulandha Pranatan Inggil (KTPI) sudah mampu berperan sebagai kelompok

kepentingan (*Interest Group*) yang keberadaanya mampu berfungsi sebagai mitra dan kontrol terhadap kinerja pemerintahan.

### **C. Perumusan Masalah.**

Dari paparan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah. Mengapa Presiden Julesh Alberth Bosh menjalankan kebijakan yang mendukung eksistensi budaya Jawa di Suriname, padahal rezim-rezim sebelumnya tidak melaksanakan hal tersebut ?

### **D. Kerangka Pemikiran.**

Dalam penulisan karya skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan konsep atau teori antara lain :

#### **1. Konsep Pendekatan Etnik Dalam Identitas Nasional**

(*Charles Coppel*).

Konsep ini menekankan pada negara "baru" (negara bekas jajahan) yang menurut Coppel dikategoriokan sebagai negara imigran (*Imigran State Assimilations*) dan negara kolonialis atau

proteksionis lebih condong ke negara pribumi (*Indigenous State*) karena unsur budaya, tata budaya dan kemasyarakatannya yang lebih mapan dan terbentuk. Dengan kata lain negara imigran dikategorikan sebagai negara berkembang dan negara pribumi dikategorikan sebagai negara maju. Karena perbedaan unsur waktu saja dalam merealisasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai.<sup>11</sup>

Negara imigran sebagai bagian dari kelompok dunia ketiga, mampu berkembang secara eksis apabila didukung oleh sumber daya alam yang mencukupi, namun bukan berarti sumber daya alam semata-mata. Namun faktor tingkat kemajuan sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan kemasyarakatan suatu bangsa.

Faktor sumber daya manusia yang baik akan mendukung majunya sistem transformasi dalam menjembatani nilai-nilai lintas budaya dan perpanjangan tangan dari alih teknologi karena dapat dipungkiri bahwa negara "baru" perlu be

(*Pressure Group*) yang berfungsi sebagai pengawas (*Watch*). Pada mekanisme jalannya pemerintah suatu rezim, sehingga pemerintah (*Eksekutif*) lebih dapat memperhatikan aspek-aspek atau dinamika yang seringkali "tidak tersentuh" serta agar tercipta perimbangan (*Deterant*) dan jaminan integritas nasional.

Aplikasi konsep ini terhadap maksud dukungan rezim Jules Alberth dalam mendukung eksistensi budaya Jawa di Suriname adalah nilai tambah komunitas Jawa di Suriname yang telah mampu berasimilasi menjadi komunitas yang condong ke kelompok kepentingan atau kelompok penekan (*Pressure Group*), keturunan Jawa di Suriname telah mampu berbaur dengan penduduk lokal lainnya dan beberapa diantaranya berhasil menduduki jabatan elite dan birokrat. Sehingga keberadaanya di Suriname telah mampu menjadi aset integral dari mekanisme Pemerintahan di Suriname.

### 3. Konsep Demokrasi Konsosiasional (Arend Lipjhart 1968).<sup>13</sup>

Arend Lipjhart mengemukakan bahwa demokrasi adalah proses kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang wewangnya berada penuh di tangan masyarakatnya (*rakyat*), namun demokrasi bukanlah sesuatu paham yang sempurna karena paham ini sangat rentan terhadap aksi anarkhisme sering dengan besarnya peran dan wewenang masyarakat/*rakyat*. Dengan kata lain demokrasi bukanlah paham yang sesuatu yang baik, namun demokrasi adalah sesuatu yang banyak.

Dalam rangka meminimalisir benturan-benturan akibat konsekuensi peran masyarakat/*rakyat* yang relatif besar maka terdapat suatu sistem "jalan tengah" yaitu demokrasi konsosiasional, menurut Lipjhart demokrasi konsosiasional adalah paham demokrasi yang menitik beratkan pada konsolidasi atau upaya negosiasi yang diikuti oleh elemen-elemen yang berkompeten. Sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang stabil dan kondusif, demokrasi

---

<sup>13</sup> Lipjhart, Arend. Dalam Toim. Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994. Hal 16

konsosiasional sangat relevan pada kalangan masyarakat atau negara yang berkarakteristik pluralis (beraneka ragam) baik dari segi etnis, ideologi, ras dan wilayah. Melalui demokrasi konsosiasional maka dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang stabil atas dasar kompromi pada berbagai elemen sehingga didapatkan suatu "out-put" yang saling memuaskan (*win - a win*), dalam demokrasi konsosiasional toleransi menjadi salah satu hal yang sangat penting.

Aplikasi kasus ini pada dukungan rezim Presiden Julesh Alberth Bosh dalam mempertahankan eksistensi budaya Jawa di Suriname adalah peran Rezim Juleh dalam rangka mengakomoldir komunitas Jawa, karena pada dasarnya komunitas Jawa di Suriname sudah mampu berperan sebagai aset nasional, disamping etnis Kreole, India dan Negro. Apabila dibandingkan dengan demokrasi konsosiasional di Malaysia, demokrasi konsosiasional di Suriname terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, diantaranya sebagian besar masyarakat Malaysia merupakan penduduk asli yang lebih bersifat homogen yang terdiri atas etnis

Melayu sebagai etnis mayoritas dan Etnis pendatang yaitu etnis China sejumlah 32 persen dan India sejumlah 9 persen dari jumlah total penduduk Malaysia. Etnis pendatang tersebut datang secara sukarela di Malaysia dengan motif ekonomi dan kesejahteraan, sehingga lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan di Malaysia.

Kasus demokrasi konsosiasional di Malaysia berbeda dengan di Suriname karena pada dasarnya keberadaan komunitas Jawa di Suriname merupakan "buangan" akibat kolonialisme Belanda, dalam rangka menjadi tenaga kerja dan budak bagi industri-industri Belanda. Namun dapat dilihat bahwa keberadaan etnis Jawa di Suriname ternyata mampu tampil eksis bersama etnis lainnya yaitu Kreole sebagai ras mayoritas, India dan Negro. Bahkan masyarakat Jawa mampu berperan dengan menduduki posisi penting dalam pemerintah dan birokrasi di Suriname.

## **E. Hipotesa.**

Melalui pendekatan diatas maka dapat ditarik hipotesa, rezim Julesh Alberth Bosh mendukung upaya mempertahankan budaya Jawa di Suriname karena :

1. Memperkuat identitas nasional Suriname melalui pendekatan etnis.
2. Melakukan perimbangan kelompok kepentingan.
3. Mewujudkan demokrasi konsosiasional di Suriname.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistem analisis kualitatif melalui metode penelitian diskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder. data pengamatan terhadap obyek dikumpulkan melalui penelitian pustaka (*Library research*). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data dari buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, laporan penelitian dan data dari internet.

## **G. Tujuan Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah serta menjawab hipotesa, tentang tujuan Presiden Julesh Alberth Bosh dalam memperthankan budaya Jawa di Suriname.
2. Penulisan ini ditujukan sebagai informasi kepada pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan tentang dinamika budaya Jawa di Suriname.
3. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan bahwa, kebudayaan sebagai buah cipta, rasa dan karsa manusia mampu kekal turun-temurun walaupun sudah terpisah jarak yang sangat jauh.
4. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **H. Jangkauan Penelitian.**

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi

penulisan ini pada tahun 1997 hingga tahun 2000. dipilih periode tersebut karena pada interval tahun tersebut terdapat berbagai dinamika dan fenomena yang menarik dari Pemerintahan Jules Alberth terhadap eksistensi budaya Jawa yang dinilai sangat krusial. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevanan terhadap topik yang sedang dibahas.

## **I. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terbagi atas enam bab yaitu :

**BAB I** yang merupakan pendahuluan berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** membahas tentang berbagai problematika nasional Suriname, mencakup identitas nasional perimbangan kelompok kepentingan dan kekuasaan sistem kepartaian.

**BAB III** berisi tentang berbagai dinamika kebudayaan Jawa di Suriname, mencakup faktor sejarah, kehidupan masyarakat hingga peran serta dalam sistem politik dan pemerintahan di Suriname.

**BAB IV** membahas tentang bentuk-bentuk dukungan rezim Julesh Alberth dalam mendukung keberadaan budaya dan komunitas Jawa, mencakup latar belakang, alasan dan berbagai dampak yang diperoleh. Khususnya dinamika terhadap hubungan bilateral Indonesia-Suriname.

**BAB V** membahas tentang Alasan Julesh Alberth Bosh dalam mendukung eksistensi budaya Jawa di Suriname, mencakup memperkuat identitas nasional, perimbangan kelompok kepentingan dan pelaksanaan kebijakan demokrasi konsosiasional di Suriname.

**BAB VI** berisi kesimpulan.